



PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI LINGKUGAN
HIDUP SEDUNIA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ke-50 Tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah dipandang perlu adanya Pembentukan Panitia Penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan dan Lingkungan Hidup, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Tengah Tahun 2022 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan, Pertanahan Provinsi Papua Tengah Nomor 120/105/DLHKP/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023 Perihal Pemyampaian TOR Kegiatan dan Draf SK Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Panitia Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia Ke-50 Tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.


KELIMA...../4

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan, Pertanahan Provinsi Papua Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 82 TAHUN 2023
TANGGAL 30 MEI 2023

SUSUNAN PANITIA HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
TAHUN 2023

- Penasehat/Pelindung : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
4. Pimpinan PT. Freeport Indonesia
- Ketua : Aleksander Pekei, S.STP, M.Si
(Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah)
- Wakil Ketua : Emelia Ubra, SP, M.BA
(PT. Freeport Indonesia)
- Sekretaris : S. Prihadi Rudi Harnowo, S.Hut
(Staf DLHKP Provinsi Papua Tengah)
- Bendahara : Verna Mendila, Amd.Hut
(Staf DLHKP Provinsi Papua Tengah)
- Pendukung : 1. PT. Freeport Indonesia
2. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
3. Indonesian Sawmill dan Wood Working Association (ISWA) Nabire
4. Nexfood Nabire
5. Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire
- Sekretariat Koordinator : John K. Loinenak, S.Hut, M.Si
- Anggota : 1. Victor Fun, S.Sos, M.Si
2. Yance Rumpumbo, S.Sos
3. Rulli Kristiani, SE
4. Syarifudin, S.Hut
5. Selina Sefi Asmuruf, S.Hut
6. Marthinus Slamet Palin, S.Hut
7. Barnabas Baab
8. Tauhid Fabanyo, ST
9. Suratn T. Simanjuntak, SP
10. Velik T. Lummi
11. Priyo Sutrisno, S.Hut
12. Matius Y. Wopairi
13. Jhoni Hasudungan Siahaan, S.STP
14. Ritha Saranga, SE
15. Rany Labetubun, S.IP
16. Kayum C. Murin
17. Jerry Oei

Seksi Acara...../2

Seksi Acara dan Lomba
Koordinator

- : 1. Ice Yumai, ST, M.Si
- : 2. Alanthino Wiaya, S.STP, M.Si
3. Frans Han Erari, S.STP
4. Meriands Uniplaita, S.STP
5. Silpiter Raiki, S.Sos
6. Mathius Misi, SE
7. Yohanes H.Y. Reyaan, S.Hut
8. Oswald Sobuber, S.Sos
9. Barnabas Gobai, S.Sos, MM
10. Febrisandy Maria M. Samosir
11. Afia Pitorsina Waimuri, S.Hut
12. Matius Sabar Timang, S.Sos.M.Si
13. Herman Wayeni, ST
14. Habel Tekege
15. Amalia Togubu
16. Ruth Sarampang, SP
17. Ika Sriatin
18. Jonisius Tamono
19. Verlhyn Adrina Soindemi, S.STP
20. M. Ilham Ardiansari, S.Tr.IP
21. Rani Valerie Pirade, SH

Seksi Perlengkapan dan
Transportasi
Koordinator
Anggota

- : 1. Markus Dely Ngamel, S.Hut
- : 2. Bakthiar, S.Hut
3. Yafet Situru Lampung, ST
4. M. Nafri Barmawi, S.Hut, M.Si
5. Petrus You, SST
6. Abdui R. Rumakat, Amd.Hut
7. Fandi Ahmad Paus Paus
8. Isak Adii
9. Adi Nugroho
10. Bompek Beny Said Rumbrar
11. Agus Palangan
12. Desti Tanduk Allo, ST
13. Melkias Iyowau
14. Fransiskus Dumupa, Amd.Hut
15. Jufi Sanggena Tuo, S.Hut
16. Mitra Kehutanan/ISWA
Nabire/Himpunan Pengusaha Kayu Lokal
17. Aten Waine (Staf Biro Hukum)

Seksi Konsumsi

Koordinator

Anggota

- : 1. Meriyanti Watta, S.Hut
- : 2. Arlin Ratunna
- 3. John Misiro, S.Hut, M.Si
- 4. Aminto, S.Hut
- 5. Darius Tandi Payung, S.Hut
- 6. Elisabeth Tekege, Amd.P
- 7. Mesak Ijie, S.Sos
- 8. Yosita Mardata, S.Hut
- 9. Siana Rumbekwan
- 10. Leonardus Gobai
- 11. Icc Ogctai
- 12. Serlina Barrung, S.Hut
- 13. Linda Sihotang, S.IP
- 14. Loisa Erari
- 15. Akkila Yuliana M. Sikoway, S.IP
- 16. Marthinus Menggo, SH
- 17. Marcelina Bunapa, S.Hut
- 18. Baldus Rumbobiar
- 19. Daud Wopairi
- 20. Doly Pigai (Staf Biro Hukum)

Seksi Dokumentasi dan
Publikasi

Koordinator

Anggota

- : 1. Mario Salvator N.S.R. Duwiri, S.Hut
- : 2. Irwan Bara, S.IP, M.IP
- 3. Inneke Kusumastuti, S.Kom
- 4. Mikhaela Leonarda Lea Ena, S.STP
- 5. Yosep Supryono, S.Si
- 6. Ofni Yeimo, SE
- 7. Petrus Iyai, St
- 8. Maximus M. Kayame, SE
- 9. Tumpak Suganda Manik, S.Hut
- 10. Frans Yeimo, S.Sos, M.Si
- 11. CH. Johanis Iwisara
- 12. Stepanus Pakage, SH, MH
- 13. Elpianti Pabate
- 14. Adrew Stenly Sembor
- 15. Rini Fun
- 16. Yunita Pamenta

Seksi Keamanan

Koordinator

Anggota

- : 1. Otis Monei, S.Sos, M.Si
2. Selsius Windesi, SH
3. Bestian Manurung
4. Arnoldus Berotabui
5. Herman T. Samber
6. Fredy Yeimo, S.Sos
7. Kolombus Mandibo
8. Agustinus Woromboni
9. Yunus Raru
10. Abner Rumatrai
11. Ectwel Weri
12. Yunus Monei, S.IP
13. Demas Frenki Sinaga, S.IP
14. Festus AP
15. Sefnat Hara
16. Yonias Wambrauw
17. Verry Fernando Rumbaibab
18. Gregol Rumbiak
19. Yopi Boy Patiwenas
20. Korneles Singgamui

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE POTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001